

1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal
 - A. 10 November 2001
 - B. 10 Agustus 2002
 - C. 18 Agustus 2000
 - D. 19 Oktober 1999
 - E. 10 November 2002
2. Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh
 - A. Sekurang-kurangnya 4/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 - B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 - C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
 - E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Salah satu sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah
 - A. Negara berdasarkan kekuasaan
 - B. Negara berdasarkan sistem absolutisme
 - C. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
 - D. Negara berdasarkan ketuhanan
 - E. Negara berdasarkan sistem konstitusi
4. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - E. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
5. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan

Perwakilan Rakyat tidak dapat memberikan persetujuannya setelah melakukan persidangan, maka langkah yang harus dilakukan Presiden adalah

- A. mencabut peraturan pemerintah tersebut
 - B. merevisi peraturan pemerintah tersebut untuk kemudian mengajukannya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan
 - C. mengganti peraturan pemerintah tersebut dengan peraturan pemerintah yang baru
 - D. merubah peraturan pemerintah tersebut hingga sesuai dengan yang dikehendaki Dewan Perwakilan Rakyat
 - E. melakukan lobi politik kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
6. Salah satu landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain di dunia ini adalah
 - A. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
 - C. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945
 - D. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945
 - E. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945
7. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar-Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi ditetapkan oleh .
 - A. Presiden
 - B. Gubernur
 - C. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
 - D. Kepala Badan Kepegawaian Negar
 - E. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
8. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, penetapan pemenang ditentukan melalui jumlah suara masing-masing pasangan. Sesuai pasal 6A ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- A. lebih dari 50% – sedikitnya 20%
- B. lebih dari 40% – sedikitnya 20%
- C. lebih dari 30% – sedikitnya 20%
- D. lebih dari 25% – sedikitnya 20%
- E. lebih dari 20% – sedikitnya 20%

9. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam

- A. Undang-Undang Dasar 1945
- B. Undang-Undang (UU)
- C. Keputusan Presiden (Keppres)
- D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- E. Keputusan Menteri Sekretaris Negara (Kep-Mensesneg)

10. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas dan tugas pembantuan.

- A. dikotomi
- B. hegemoni
- C. ekonomi
- D. otonomi
- E. musyawarah mufakat

11. Tugas Komisi D Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah membahas

- A. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- B. non-GBHN
- C. Pertanggungjawaban Presiden
- D. Amandemen Undang-Undang Dasar
- E. Perubahan Undang-Undang

12. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden berhak memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari

- A. Mahkamah Konstitusi
- B. Mahkamah Agung

C. Komisi Yudisial

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

E. Dewan Perwakilan Rakyat

13. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23F ayat 2, pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah

- A. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden
- B. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat
- C. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota
- D. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
- E. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan

14. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapakah yang menyatakan, Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang?

- A. Pasal 23A
- B. Pasal 23B
- C. Pasal 23C
- D. Pasal 23D
- E. Pasal 23E ayat 1

15. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat 4, pemilihan Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung adalah

- A. dipilih dari dan oleh Hakim Agung
- B. dipilih oleh Presiden
- C. dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan
- D. dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
- E. dipilih oleh kehakiman

16. Menurut pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas

- A. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara
 - B. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - C. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - D. TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - E. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara
17. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan
- A. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000
 - B. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000
 - C. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000
 - D. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
 - E. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000
18. Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
- A. kebebasannya
 - B. kedaulatannya
 - C. kemerdekaannya
 - D. kebangsaannya
 - E. Kenegaraannya
19. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal
- A. Pasal 28A
 - B. Pasal 28B
 - C. Pasal 28C
 - D. Pasal 28E ayat (1)
 - E. Pasal 28E ayat (3)
20. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut
- A. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - B. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
 - C. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
 - E. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
 - A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - B. Mahkamah Agung (MA)
 - C. Mahkamah Konstitusi (MK)
 - D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
 - E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan
 - A. keistimewaan daerah
 - B. kepentingan daerah
 - C. kepentingan nasional
 - D. kekhususan dan keragaman daerah
 - E. kepentingan daerah dan nasional
3. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Komisi Yudisial
 - C. Kehakiman
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah
 - A. Presiden
 - B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - D. Mahkamah Agung (MA)
 - E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?
 - A. 20 hari
 - B. 30 hari
 - C. 60 hari
 - D. 70 hari
 - E. 90 hari
6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah
 - A. mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
 - B. tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
 - C. menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
 - E. merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal
 - A. Pasal 10
 - B. Pasal 11 (1)
 - C. Pasal 11 (2)
 - D. Pasal 12
 - E. Pasal 13
8. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapny menjadi
 - A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

- menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - C. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
9. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan kepada
 - A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah
 - B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah
 - C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah
 - D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
 10. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi
 - A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
 - B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
 - D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 - E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 11. Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas membahas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah
 - A. Komisi A
 - B. Komisi B
 - C. Komisi C
 - D. Komisi D
 - E. Komisi E
 12. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - A. 2/3 ditambah 1
 - B. 1/3 ditambah 1
 - C. 40% ditambah 1
 - D. 50% ditambah 1
 - E. 60% ditambah 1
 13. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”bunyi pasal tersebut diatas diatur dalam UU yaitu ...
 - A. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.
 - B. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.
 - C. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.
 - D. Penjelasan Tap MPR no.10 tahun 2002
 - E. Amandemen tahun 1999 tentang aturan dan masa jabatan presiden
 14. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undangundang, Presiden berhak menetapkan
 - A. Keputusan Presiden
 - B. Ketetapan Pemerintah
 - C. Dekrit Presiden
 - D. Peraturan Pemerintah
 - E. Undang-Undang sementara.
 15. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan bunyi diatas maka undang-undang tentang pemilu diatur dalam Undang-undang Pasal ...
 - A. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - C. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

- D. Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
- E. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945
16. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang....
- A. Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- B. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
- C. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
- D. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
- E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
17. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal....
- A. Pasal 24B dan 24C
- B. Pasal 24C dan 24D
- C. Pasal 24D dan 24E
- D. Pasal 24E dan 24F
- E. Pasal 24F dan 24G
18. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-....
- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. Semua salah
19. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah....
- A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya.
- B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.
- E. Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah ber dasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.
20. Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-....
- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. Semua salah